

## Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

M. Habib Alwi<sup>1</sup>, Wiene Surya Putra<sup>2</sup>

Institut syekh Abdul Halim Hasan binjai<sup>1 2</sup> Medan, Sumatra Utara  
habibalwim8@gmail.com<sup>1</sup>, wienesuryaputra@gmail.com<sup>2</sup>

### Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,  
Vol: 2, No: 1, Januari 2024  
Halaman : 421-425

### Keywords:

implementation  
education  
policy

### Abstract

*Implementation of Islamic education policies in Indonesia is an integral part of the government's efforts to strengthen Islamic values in the national education system. This policy covers various aspects, from curriculum to human resource development. This article reviews the dynamics of implementing Islamic education policies, highlighting the challenges and opportunities faced in integrating Islamic values with cultural diversity and the needs of modern education in Indonesia. This research uses a policy analysis approach to understand the impact and effectiveness of this implementation, focusing on the role of educational institutions, community support, and policy adaptation at the local level. It is hoped that the implications of these findings will provide a clearer view of the role of Islamic education in strengthening Islamic identity amidst the dynamics of Indonesia's diversity.*

### Abstrak

*Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum hingga pengembangan sumber daya manusia. Artikel ini mengulas dinamika implementasi kebijakan pendidikan Islam, menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan keberagaman budaya dan kebutuhan pendidikan modern di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan untuk memahami dampak dan efektivitas implementasi tersebut, dengan fokus pada peran lembaga pendidikan, dukungan masyarakat, dan adaptasi kebijakan di tingkat lokal. Implikasi temuan ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang peran pendidikan Islam dalam mengukuhkan identitas keislaman di tengah dinamika keberagaman Indonesia.*

**Kata Kunci** : implementasi, kebijakan pendidikan

### PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan moral masyarakat. Implementasi kebijakan pendidikan Islam menjadi aspek krusial dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan Islam diimplementasikan di Indonesia. Dengan memerhatikan dinamika multikultural dan tantangan dalam menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan keberagaman lokal, penelitian ini berusaha menggambarkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, serta pelaku utama dalam proses implementasi kebijakan pendidikan Islam. Melalui analisis mendalam terhadap perubahan kebijakan, hambatan, dan dampaknya terhadap praktik pendidikan Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia.

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber kajian artikel ini adalah buku, tesis, artikel atau jurnal, serta prosiding yang sesuai dengan tema atau topik yaitu implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Adapun sumber didapat melalui berbagai media cetak atau buku dan media elektronik dengan google scholar maupun website terkait. Pengecekan data pada artikel ini menggunakan berbagai bahan referensi agar hasil yang didapatkan maksimal. Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu dengan membaca, mencatat, kemudian mengolah data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan

Secara Etimologis, Kata Implementasi Jika Dirujuk Dari Kamus Webster, yakni to implement (mengimplementasikan) Berarti melakukan suatu). Begitu pula implementasi Kebijakan ialah tahapan bertahap instan berbeda Dengan formulasi rumusan masalah atau perumusan kebijakan Sebagai Tahapan Yang Bersifat teoretis ( Muhammad Jumhadi Dan Warijo, 2008). Berkaitan Dengan Definisi Implementasi Kebijakan, dapat merujuk komentar para Pakar, diantaranya Anderson ( 2006) mengemukakan bahwa policy implementation is the application by government's administrative machinery To the problems. Penerapan kebijakan oleh pemerintah, Biasanya Selaku proses politik serta administratif dimulai Apabila tujuan, sasaran telah diresmikan, program kegiatan Telah Disepakati Dan Dana Sudah Siap Serta Disalurkan Buat Mencapai tujuan (Grindle, 1980). Jika kamu mengerti Ini disinkronkan dengan lintasan dan fokus (perubahan) lalu Kebijakan yang diterapkan sejalan dengan pandangan Van Mitte dan Van Horn dalam Parsons (1995) dan Verbava (1994) Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan Dilakukan secara terpisah oleh organisasi pemerintah dan swasta Individu dan kelompok mencapai tujuan dan Tujuan yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang lain, Solichin Mujianto (2015:151) Dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang panjang Memecahkan permasalahan tersebut, bagaimana aktor kebijakan Menerapkan keputusan kebijakan. dimana keseluruhannya Tindakan pemangku kepentingan dipandu Untuk mencapai tujuan kebijakan Hal serupa juga dijelaskan Implementasi kebijakan adalah cara implementasinya Sehingga kebijakan organisasi dapat mencapai tujuannya Dan langsung menetapkan tujuan Dalam bentuk rencana kegiatan atau melalui Merumuskan kebijakan turunan (Policy Derivatives) Sendiri sebagai kebijakan interpretatif atau biasa disebut dengan Dan peraturan pelaksanaannya (Riant Nugroho, 2009). Proses Hal ini dicapai melalui serangkaian kegiatan Berkontribusi pada keputusan program dan kebijakan Terwujud dalam praktik organisasi (Putt dan Springer. 1989)

### 2. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Berkenaan dengan pendekatan yang bisa digunakan dalam implementasi kebijakan, sebagaimana dipaparkan Hasbullah ( 2015), paling tidak ada 4 pendekatan, ialah:

#### a. Pendekatan Struktural.

Pendekatan struktural ini ialah salah satu pendekatan yang bersifat top- down. Pendekatan ini memandang bahwa tiap kebijakan, tercantum pula kebijakan pembelajaran, harus dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara struktural. Pendekatan ini menekankan berartinya komando serta supervisi bagi tahapan ataupun tingkatan dalam struktur masing- masing organisasi. Pendekatan ini bersifat hirarkis- organis, sehingga relevan buat situasi- situasi implementasi dimana didalamnya diperlukan organisasi pelaksana yang bertingkat dengan pola perubahan kebijakan yang besar.

#### b. Pendekatan Prosedural dan Manajerial.

Pendekatan ini dibesarkan buat mengatasi kelemahan pada pendekatan struktural. Pendekatan ini berupaya meningkatkan proses- proses serta prosedur- prosedur yang relevan baik prosedur manajerialnya ataupun teknik manajemennya

#### c. pendekatan perilaku.

Metode ini meletakkan dasar Semua arah kegiatan Implementasi kebijakan kebiasaan manusia Aktuator belum dimulai Organisasi itu seperti dua metode sebelumnya. Metode ini mengasumsikan Kekuatan implementasi kebijakan Hal yang baik adalah perilaku Manusia dan segala sikapnya juga harus mempertimbangkan dan dipengaruhi oleh proses implementasi kebijakan Hal ini dapat berjalan dengan lancar.

#### d. pendekatan politik.

Pendekatan ini lebih fokus pada faktor politik atau Kekuatan yang bisa memperlancar ataupun membatasi proses implementasi kebijakan. Pendekatan politik senantiasa memikirkan atas pemantauan kelompok pengikut serta kelompok penentang beserta dinamikanya. Dalam pendekatan ini, membolehkan digunakannya paksaan dari kelompok dominan.

### **3. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Terdapat sebagian aspek yang mempengaruhi bagi George C. Edwards III ( Mulyono, 2009):**

#### **1. Komunikasi**

wajib dicoba secara jelas serta terperinci supaya tidak terdapat Perbandingan interpretasi ataupun kesalahan komunikasi. Maksudnya, pelaksanaan kebijakan tersebut wajib dapat diterima oleh segala pegawai serta wajib mempunyai pemahaman yang jelas serta akurat tentang iktikad serta tujuan kebijakan tersebut. Terdapat 3 hal yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan aspek komunikasi Transmisi, ialah penyaluran komunikasi yang baik. Kejelasan informasi Konsistensi dalam mengantarkan data.

#### **2. Daya**

Sumber energi yang diartikan antara lain jumlah anggota, keahlian Pelaksana, data relevan yang mencukupi untuk melakukan kebijakan, Kewenangan mengelola program sejalan dengan yang diharapkan, serta adanya Sarana pendukung, ialah sumber energi manusia. Perihal tersebut ditujukan dalam Melakukan aktivitas program semacam pembiayaan serta infrastruktur. Bakat yang Tidak mencukupi mempengaruhi penyampaian program yang tidak mencukupi. Untuk itu dibutuhkan manajemen talenta yang baik untuk meningkatkan kinerja program. Bagian urgen yang lain ialah pengadaan kantor, perlengkapan, dana yang lumayan, dan Perlengkapan lain yang diperlukan untuk melakukan kebijakan/ program tersebut.

#### **3. Disposisi**

Disposisi berarti sifat serta mutu pelaksana, ialah mencakup komitmen, Kejujuran, hakikat demokrasi. Terdapat 3 wujud perilaku/ respon terhadap suatu Kebijakan. Maksudnya, arah/ arahan pelaksana menjawab program terhadap persepsi Pelaksana, penerimaan ataupun penolakan, serta kekuatan asumsi. Pelaksana bisa jadi menguasai iktikad serta tujuan program, namun tidak bisa melaksanakan Program dengan baik sebab menolak tujuan yang tercantum dalam program, Meninggalkan kesempatan untuk mengusik serta menjauhi penerapan program. Dalam proses tercapainya tujuan sesuatu program, semacam kepemimpinan, Memerlukan banyak sokongan eksekutif, sebab mempunyai akibat yang signifikan Terhadap penerapan program untuk mencapainya secara efisien serta efektif.

#### **4. Struktur**

Struktur organisasi birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program serta memegang peranan berarti. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Implementasi kebijakan. (Aisah et al., 2021) Salah satu aspek berarti dari sebuah Organisasi merupakan terdapatnya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi Pedoman aksi.

#### **5. Problematika Pendidikan**

Indonesia ialah salah satu negeri dengan mutu pembelajaran yang kurang baik. Sementara itu pembelajaran ialah peninggalan terutama kemajuan bangsa. Adapun Kekurangan dalam pembelajaran yang terletak di Indonesia ini semacam halnya:

##### **1. Fasilitas prasarana**

Banyak sekali perbandingan mutu dalam perihal fasilitas serta prasarana yang Terjalin di bermacam sekolah di Indonesia ini semacam di kota, desa, serta desa yang Sangat terpelosok ataupun terpencil. Perihal ini bisa jadi telah kita tahu dari bermacam platform kabar kalau mutu fasilitas prasarana di sekolah perkotaan Lebih baik daripada yang di desa ataupun apalagi yang di desa terpencil yang sangat Tidak layak. Ada pula keadaan bangunan sekolahnya bisa jadi hendak sangat jauh Berbeda serta dapat dikatakan tidak layak seperti halnya bangunan yang hampir Rubuh serta sangat tidak terpelihara. (Nasution, 2019)

##### **2. Tenaga Pendidik**

Profesionalisme guru jadi keharusan untuk mewujudkan sekolah Berbasis pengetahuan, ialah uraian tentang pendidikan, kurikulum, dan Pertumbuhan manusia tercantum style belajar. (Afifah, 2015) Mutu dari Seseorang guru saat ini jadi perihal yang sangat dipertimbangkan sebab bisa Dikatakan kurang mencukupi. Hendak namun ini tidak bisa di judge begitu saja Sebab kita wajib mengakui pula

jumlah guru yang sedikit menimbulkan tidak Meratanya penyebaran guru ini di segala Indonesia. Jumlah guru yang tidak mencukupi umumnya terjalin di wilayah terpelosok Atau pun terpencil, setelah itu wilayah tersebut di perbatasan dengan negeri lain. Berbeda dengan di perkotaan yang terjalin penimbunan guru sebab sarana Prasarananya lengkap, apalagi dalam pembelajaran di suatu sekolah bawah saja Dalam satu sekolah dapat samapai sebelas hingga 4 belas orang guru, yang Didalamnya tercantum kepek serta wakepek. Hingga dari itu guru yang Bertempatan di perkotaan hendak bertahan serta terus maju serta guru di wilayah terpencil akan semakin terpuruk jika pemerintah tidak Memperhatikanya.(Amelia, 2019)

### 3. Permasalahan Kurikulum

Pendidikan Permasalahan kurikulum meliputi permasalahan konsep serta pula penerapannya. Kurikulum di Indonesia masih terbilang sangat lingkungan dibandingkan Kurikulum pembelajaran negeri lain. Perihal tersebut bisa dilihat dari banyaknya Siswa yang merasa terbebani dengan beberapa modul yang wajib dimengerti. Tidak hanya itu, tugas administrasi guru terus menjadi bertambah sehingga dalam mengajar Kurang optimal.( Amelia, 2019)

### 4. Kebijakan pendidikan Islam di masa Covid-19 dan permasalahannya

Pandemi Covid-19 membawa dampak besar pada banyak bidang kehidupan Orang termasuk pendidikan, metode pembelajaran, guru, siswa, proses Pendidikan senior dan kurikulum yang berubah tergantung situasi. Nadym Makaliem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Terjadi online pada 17/03/2020 dan pulang ke rumah untuk memblokir Penyebaran Covid 19 menjadi pedoman dalam menerapkan pembelajaran saat ini Pandemi Kementerian Agama sebagai pimpinan organisasi pendidikan keagamaan Islam menerbitkan Pedoman Kurikulum Darurat Madras Mendukung pembelajaran secara teregulasi di masa pandemi Covid-19 Dalam Surat Keputusan Direktur Pendidikan Agama Islam No. 2791. 2020. Urusan Penekanan dalam kurikulum luar biasa ini berkaitan dengan pengembangan

Berkepribadian, berkepribadian luhur, ubudya dan kemandirian siswa. Namun, aspek keterampilan inti dan inti menjadi perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 harus dimanfaatkan Teknologi dan jaringan online untuk mengadaptasi kegiatan pembelajaran Dengan era normalisasi baru. Pembelajaran online Menjadi tantangan bagi seluruh pelatih Indonesia karena ini pertama kalinya Banyak diterapkan di Indonesia. Pembelajaran online Memerlukan komunikasi yang baik antara siswa, sekolah dan orang tua. Komunikasi hanya dapat terjadi antara siswa, sekolah dan orang tua Dilakukan secara virtual. Penyebab buruknya pengelolaan iptek Menghambat perkembangan sekolah di masa pandemi. (Nadhiroh, 2021)

### 5. Metodologi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Rian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (Syamsuddin, 2016) menyatakan demikian Beberapa keadaan yang diperlukan agar metodologi dapat melaksanakan Petunjuk ini Pendidikan meliputi:

1. Lingkungan eksternal tidak dikenali oleh organisasi atau entitas yang menjalankan operasinya. Menimbulkan masalah besar.
2. Apakah tersedia cukup sumber daya (misalnya aset) untuk melakukan hal ini Waktu.
3. Apakah pembaruan aset yang diperlukan benar-benar ada.
4. Apakah kontrak didasarkan pada sebab akibat dan kepercayaan
5. Banyaknya hubungan sebab akibat yang terjadi. Hal ini menjadi semakin tidak dapat
6. diterima Semakin tinggi keadaan dan konektivitas dari hasil logis, semakin tinggi pula hasil yang diinginkan. Strategi dapat dicapai.
7. Apa yang dimaksud dengan hubungan perkumpulan kecil? Sebagai premis, yang
8. terjadi adalah itu Jika ketergantungannya banyak maka tidak akan berjalan lancar.
9. Bagus.
10. Memahami secara mendalam dan menyelesaikan tujuannya
11. Tugas dijelaskan secara rinci dan disampaikan dengan permintaan yang relevan.
12. Respon dan koordinasi yang sangat baik.
13. Mereka yang berkuasa bisa menuntut dan mendapatkan. Ketaatan yang tidak biasa

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan pendidikan hal yang sangat penting dan mempunyai arti luas Implementasinya harus selalu dipantau dan dievaluasi. Sedang dalam implementasi Kebijakan pendidikan merupakan bisa bersifat top-down, bottom-up, Prosedur dan Pendekatan Manajemen dan Politik. Implementasi kebijakan pendidikan Dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk komunikasi, sumber Kekuasaan, disposisi dan struktur. Dalam menentukan kebijakan pendidikan harus: Mengamati dan beradaptasi dengan situasi atau perubahan saat ini. Misalnya Penerapan pembelajaran daring di tengah dunia yang sedang dilanda pandemi Covid-19.

## **REFERENCES**

- Afifah, N. (2015). Problematika Pendidikan di Indonesia (Telaah dari Aspek Pembelajaran). *Jurnal Pendidikan*, 1(Vol. 1 Januari 2015: *Jurnal Pendidikan*), 41–74. <https://unimuda.ejournal.id/jurnalpendidikan/article/view/148>
- Aisah, H., Zaqiah, Q. Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128–135. <http://ejournal.stitalquraniyah.ac.id/index.php/jpia/>
- Amelia, C. (2019). Problematika Pendidikan di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan V (Vol. 3)*.
- Anwar, M. E. (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 03(Januari), 483–496
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (T. Siregar (ed.); 1st ed.)*. K-Media.
- Azza N, F., Setiawan, F., Saputra, R., Yuliatin, A. T., & Ilham, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(2), 362–365. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i2.3254>
- Aceh, Aboebakar. 1957. *Sejarah KHA. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*. Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. Wahid Hasyim.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2012. *Studi Analisa Kebijakan*. Bandung; Refika Aditama.
- Al-Nisaburi, Abu al-Husayn Muslim al-Hajaj al-Qushayri. 1992. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Syaibany, Omar Mohammad al-Toumy. 1979. *Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Amtu, Onisimus. 2013. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James. 1979. *Public Policy Making* Holt. New York: Rinehart and Winston.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Anwar, Ali. 2011. *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.